

---

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTABILITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP *GOOD GOVERNANCE*  
(STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN MINAHASA)**

Sigit Prabawa<sup>1</sup>, Herman Karamoy<sup>2</sup>, Lidia Mawikere<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: sigitprabawa7@gmail.com

**ABSTRACT**

*The reform era demands that governments run governance by being based on good governance. This research aims to prove empirically the influence of internal control system implementation and accountability of regional financial management to the efforts to realize good governance in Minahasa district. The type of research used is quantitative research with a descriptive approach. The population in this study was 211 Echelon III in 33 SKPD in Minahasa District as well as sample selection using purposive sampling technique. Data collection is conducted by spreading questionnaires on 65 respondents in 32 SKPD. Data is processed using SPSS program version 25. Data analysis methods use multiple linear regression analyses and t tests to partially test hypotheses. The results showed that 1) the internal control system has a positive and significant effect on the efforts to realize good governance. 2) Accountability of regional financial management has no positive and significant effect on the efforts to realize good governance.*

*Keywords: internal control system; regional financial management; good governance*

**1. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik merupakan hal yang wajar, tuntutan ini sebagai akibat dari pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam suatu pengambilan keputusan (Sari, 2013). Sistem pengendalian intern pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peran sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Sari, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang oleh pemerintah dilakukan dengan transparan baik dari proses penyusunan hingga pertanggungjawabannya sehingga akan tercipta akuntabilitas didalam pengelolaannya (Yusniar et al., 2016). Dengan perubahan sistem pemerintahan ini dampak pada penyelenggaraan pemerintahan adalah pada perubahan sistem keuangan pemerintah daerah, salah satunya penyampaian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dalam upayanya menerapkan prinsip *good governance* telah melakukan upaya meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi kriteria

relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap upaya mewujudkan *good governance* pada pemerintah Kabupaten Minahasa.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kartikahadi et al. (2016:3) mendefinisikan akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Shatu (2016:9) menyatakan bahwa terdapat tiga kegiatan utama dalam akuntansi yakni pengidentifikasian, pencatatan serta pengkomunikasian. Pengidentifikasian dilakukan untuk memilah peristiwa ekonomi yang relevan dengan bisnis perusahaan, selanjutnya perusahaan akan melakukan pencatatan dengan tujuan merekam peristiwa ekonomi yang nantinya akan dijadikan sebagai informasi guna mengkomunikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan atau kepada pengguna laporan keuangan.

Mahsun et al. (2016:5) menyatakan bahwa sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Mahsun et al. (2016:47) menyatakan bahwa standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Sujarweni (2015:18) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala yang pernah ditimbulkan. Akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) adalah yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-lembaga pemerintah. Pencatatan itu mencakup administrasi keuangan negara, pelaporan, dan pengontrolan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku.

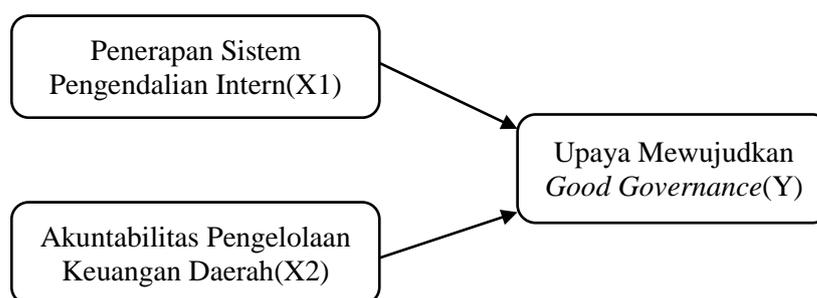
Mulyadi (2016:129) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan guna menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Mulyadi (2013:181) menyatakan bahwa keterbatasan bawaan yang melekat pada tiap pengendalian internal adalah: (1) kesalahan dalam pertimbangan gangguan; (2) kolusi; (3) pengabaian oleh manajemen; dan (4) biaya lawan manfaat. Mahmudi (2016:23) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sari (2012) dalam penelitiannya yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap *good governance* (studi pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Medan), diperoleh hasil dimana budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik, budaya organisasi kurang mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan *good governance*, dan efektivitas penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap *good governance*.

Ruspina (2013) dalam penelitiannya yaitu pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap penerapan *good governance* (studi empiris pada pemerintahan Kota Padang),

diperoleh hasil yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dan positif kinerja pemerintah daerah terhadap penerapan *good governance*, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance*, dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif sistem pengendalian internal pemerintah dengan penerapan *good governance*.

Syafrion (2015) dalam penelitiannya yaitu pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap penerapan *good governance* (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kota Solok), diperoleh hasil dimana sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*, komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*, dan budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*.



**Gambar 1. Kerangka konseptual pemikiran**

Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual atas penelitian ini. Mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Mewujudkan *good public and corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik (*public sector reform*). Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2009:20). Studi empiris yang dilakukan oleh Habibie (2013), Syafrion (2015), Ristanti et al. (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap *good governance*. Berdasarkan pemahaman-pemahaman ini maka hipotesis adalah:

*H1 : Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan good governance.*

Praktik *good governance* adalah praktik penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik. Praktik penyelenggaraan negara dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, budaya hukum, dan akuntabilitas public (Hoesada, 2016:121). Mardiasmo (2009:20) menyatakan bahwa selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu: (1) reformasi sistem penganggaran (*budgeting reform*); (2) reformasi sistem akuntansi (*accounting reform*); (3) reformasi sistem pemeriksaan (*audit reform*); dan (4) reformasi sistem manajemen keuangan daerah (*financial management reform*). Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public*

*accountability*). Studi empiris yang dilakukan oleh Ruspina (2013), Syafrion (2015), Ristanti et al. (2014) menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan *good governance*. Berdasarkan dukungan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas maka hipotesis adalah:

*H2 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan good governance.*

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 211 pejabat eselon III pada 33 SKPD di Kabupaten Minahasa yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 24 Dinas dan 6 Badan. Sampel atas responden dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. Kriteria yang dipilih dalam pemilihan sampel adalah pejabat eselon III dalam hal ini Sekretaris Dinas/Badan dan Kepala Bidang masing-masing SKPD terkait.

Perhitungan banyaknya sampel merujuk pada Arikunto (2013:62) yang mengemukakan apabila subjek populasi lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan sebagai sumber data dalam penelitian adalah  $31\% \times 211$  diperoleh 65,41 orang dan dibulatkan menjadi 65 sampel untuk 32 SKPD yang akan diteliti terdiri dari 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 24 Dinas dan 6 Badan.

Variabel operasional dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel Independen (X), dan Upaya Mewujudkan *Good Governance* sebagai variabel Dependen (Y). Variabel penerapan sistem pengendalian intern diukur dengan menggunakan indikator dalam *The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) (2013) yang menyatakan komponen dari sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan menggunakan dimensi dan indikator dalam penelitian Zeyn (2011) yang menyatakan akuntabilitas keuangan daerah antara lain: proses penganggaran, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporan. Variabel *good governance* diukur menggunakan indikator dalam penelitian Yusniyar et al. (2016) yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan keadilan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka, dan dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner di 32 SKPD yang ada di Kabupaten Minahasa. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner atau angket. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, skala pengukuran kuesioner menggunakan pendekatan dengan skala *likert*, kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya agar memenuhi kelayakan yang selanjutnya akan diolah. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* dengan bantuan SPSS versi 25. Regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern (X1), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X2) terhadap upaya mewujudkan *good governance* pada pemerintah Kabupaten Minahasa.

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Hasil penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada Sekretaris Dinas/Badan dan Kepala Bidang di 32 SKPD Kabupaten Minahasa. Berdasarkan 65 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali adalah berjumlah 45 kuesioner sedangkan 20 kuesioner tidak dikembalikan.

**Tabel 1. Hasil uji validitas**

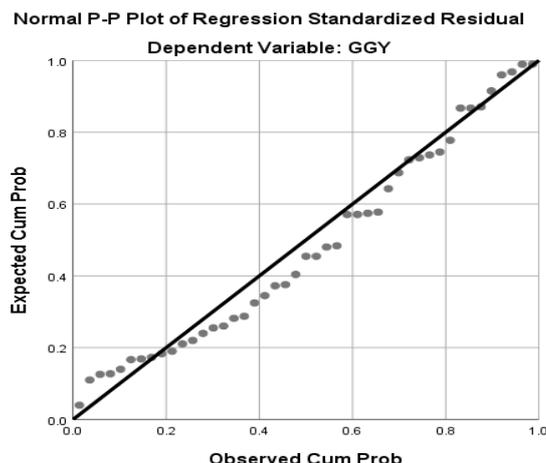
Pernyataan	Penerapan Sistem Pengendalian Intern	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Upaya Mewujudkan Good Governance
1	0.432**	0.623**	0.471**
2	0.639**	0.370**	0.361**
3	0.626**	0.327**	0.474**
4	0.562**	0.631**	0.299**
5	0.557**	0.784**	0.564**
6	0.646**	0.426**	0.626**
7	0.606**	0.442**	0.560**
8	0.660**	0.764**	0.397**
9	0.658**	0.617**	0.605**
10	0.486**	0.647**	0.306**
11	0.691**		0.438**
12	0.652**		
13	0.631**		
14	0.510**		
15	0.528**		
16	0.491**		
17	0.532**		
18	0.717**		
19	0.567**		
20	0.556**		
21	0.485**		
22	0.636**		
Cronbach Alpha	0.909	0.736	0.614

r tabel : 0,2973

Sumber: Data olah, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji validitas atas variabel penerapan sistem pengendalian intern (X1), akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X2) dan upaya mewujudkan *good governance* (Y) memiliki nilai  $r_{hitung}$  seluruh butir pernyataan variabel penelitian lebih besar dari  $r_{tabel}$ ,  $\alpha = 0,2973$ , dengan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis di dalam penelitian ini adalah valid. Tabel 1 juga menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel penerapan sistem pengendalian intern sebesar 0,909, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,736 dan upaya mewujudkan *good governance* sebesar 0,614. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliable* karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ .

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal, uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis uji *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S) dan grafik P-Plot SPSS.



**Gambar 2.** Hasil pengujian normalitas p-plot

Gambar 2 menunjukkan data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik searah mengikuti garis diagonal, jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan Tabel 2 terlihat hasil uji *Kolmogorov-Smirnov test*  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model uji telah memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 2.** Hasil uji normalitas

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	3.75780030
Most Extreme Differences	Absolute	0.095
	Positive	0.095
	Negative	-0.082
Test Statistic		0.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200

Sumber: Data olah, 2019

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF  $< 10$  dan *tolerance*  $> 0,1$  maka variabel independen terbebas dari persoalan multikolinieritas. Dari hasil perhitungan di dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ . Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen terbebas dari multikolinieritas.

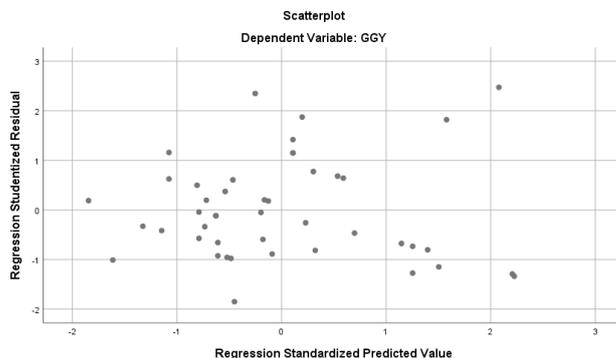
**Tabel 3.** Hasil uji multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Penerapan Sistem Pengendalian Intern	0.546	1.830
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.546	1.830

Sumber: Data olah, 2019

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian

heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan grafik *Scatterplot*, tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0.



**Gambar 3. Hasil uji heteroskedastisitas**

Berdasarkan Gambar 3 di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan, hal ini terlihat dengan tidak adanya pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0. Berdasarkan Tabel 4 maka persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:  $Y = 17.228 + 0.250X_1 - 0.032X_2$ . Persamaan regresi linier berganda di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 17.228 menyatakan bahwa tanpa ada pengaruh dari kedua variabel independen dan faktor lain maka variabel upaya mewujudkan *good governance* (Y) pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Minahasa adalah 17.228.
2. Koefisien regresi variabel penerapan sistem pengendalian intern 0.250, hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan penerapan sistem pengendalian intern sebesar 1 maka akan meningkatkan upaya mewujudkan *good governance* sebesar 0.250 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah -0.032 (negatif), hal ini berarti setiap terjadi kenaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 1 maka akan menurunkan upaya mewujudkan *good governance* sebesar 0.032 dengan asumsi variabel lain tetap.

**Tabel 4. Hasil analisis regresi berganda**

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	17.228	8.241		2.091	0.043
SPI	0.250	0.108	0.438	2.314	0.026
APKD	-0.032	0.233	-0.026	-0.137	0.891

*Dependent variable: Upaya mewujudkan good governance*

*Sumber: Data olah, 2019*

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 4 dapat dilihat nilai signifikansi variabel penerapan sistem pengendalian intern sebesar 0,026, lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  dan  $t_{hitung} = 2,314 > t_{tabel} = 2,018$ . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel upaya mewujudkan *good governance* pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 4 nilai signifikansi untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,891, lebih besar dari  $\alpha = 5\%$   $t_{hitung} = -0,137 < t_{tabel} = 2,018$ . Hasil ini

menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap upaya mewujudkan *good governance*.

#### 4.2. Pembahasan

**Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern terhadap upaya mewujudkan *good governance*.** Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 4 dan pengujian hipotesis pertama dapat dilihat nilai signifikansi variabel penerapan sistem pengendalian intern sebesar 0,026, lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  dan  $t_{\text{hitung}} = 2,314 > t_{\text{tabel}} = 2,018$ . Hasil ini membuktikan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap variabel upaya mewujudkan *good governance*. Data di atas membuktikan bahwa dengan adanya pengendalian intern yang baik maka tujuan organisasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syafrion (2015) yang menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good governance*, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Syafrion (2015), Ristanti et al., (2014) yang juga menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap *good governance*.

**Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap upaya mewujudkan *good governance*.** Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 4 dan pengujian hipotesis kedua nilai signifikansi untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,891, lebih besar dari  $\alpha = 5\%$   $t_{\text{hitung}} = -0,137 < t_{\text{tabel}} = 2,018$ . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap upaya mewujudkan *good governance*. Dengan demikian hasil tersebut tidak sejalan dengan hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian ini. Kurangnya SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dirasa memiliki dampak pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zeyn (2011) yang menyatakan penerapan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dari penelitian adalah:

1. Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Minahasa, artinya jika sistem pengendalian intern diterapkan dengan baik maka upaya mewujudkan *good governance* bisa tercapai.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. Jika akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan maka upaya mewujudkan *good governance* akan tercapai.

### 5.2. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memperluas perolehan data, baik dari jumlah responden maupun dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Minahasa, agar hasil yang diperoleh bisa lebih maksimal dan akurat.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi metode penelitian dengan melakukan wawancara langsung.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4. Demi meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik, Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama alokasi anggaran untuk kepentingan publik.
5. Pemerintah Kabupaten Minahasa juga perlu meningkatkan keterbukaan serta akses untuk mendapatkan informasi mengenai program kerja setiap SKPD yang ada agar publik turut serta dalam mengawasi kinerja Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Habibie. (2013). Pengaruh pengawasan DPRD, pengendalian internal, dan peran auditor internal terhadap good governance (Studi empiris pada pemerintah Kota Solok). *e-Journal akuntansi Universitas Negeri Padang*, 1(1), 1-21. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/156>
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kartikahadi, H. Sinaga, R. U. Syamsul, M. Siregar, S. V. & Wahyuni, E. T. (2016). *Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Edisi Kedua Jakarta: IAI.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Edisi Keempat Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. Sulistiyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2013). *Sistem akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ristanti, N. M. A. Sinarwati, N. K. & Sujana, E. (2014). Pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap penerapan good governance (Studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tabanan). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1-11. <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v2i1.3406>
- Ruspina, D. O. (2013). Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap penerapan good governance (Studi empiris pada pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1-24. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/712>
- Sari, E. N. (2012). Pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap good governance (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di Kota Medan). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 25-54. <https://doi.org/10.30596/jrab.v12i2.144>
- Sari, D. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, implementasi standar akuntansi pemerintahan, penyelesaian temuan audit terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Penelitian pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*. 1007-1049. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3304/CONTENT%20DIANA.pdf?sequence=1>
- Sari, W. N. (2017). Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan komitmen organisasi terhadap penerapan good governance (Studi empiris pada satuan kerja perangkat

- 
- daerah Kabupaten Rokan Hulu). *JOM Fekon*, 4(1), 896-910.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12480>
- Shatu, Y. P. (2016). Akuntansi laba dan rugi. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Semesta.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafrion, F. Y. Zirman, & Syofan, A. (2015). Pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan budaya organisasi terhadap penerapan good governance (Studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Kota Solok). *JOM FEKON*, 2(2), 1-14.  
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9720>
- The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO)*. (2013). Intern control-integrated framework: Executive Summary, Durman, North California.
- Yusniyar, Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern terhadap good governance dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan (Studi pada SKPA pemerintah Aceh). *Jurnal Administrasi Program Pascasarjana Unsyiah*, 5(2), 100-115.  
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4514>
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. *Jurnal Trikonomika*, 10(1), 52-62.  
[http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_522894149282.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_522894149282.pdf)